

Judul : Belanja Negara Naik Rp 9,1 Triliun
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Belanja Negara Naik Rp 9,1 Triliun

Banggar DPR dan pemerintah menyepakati poster APBN 2027 dengan pendapatan dan belanja negara masing-masing naik sekitar Rp 9,1 triliun dari usulan awal.

JAKARTA, KOMPAS – Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati poster dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUCU APBN 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan dan belanja negara sama-sama dinaikkan sekitar Rp 9,1 triliun dari usulan awal, sementara target defisit dipertahankan Rp 671,6 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja pembahasan tingkat I pembahasan RUCU APBN 2027 bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kamis (24/9/2026). Pembahasan tersebut menjadi tahap penting setelah pengantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil, pertengahan bulan ini.

Suahasil memastikan APBN

2027 yang telah disepakati pemerintah dan Banggar DPR akan tetap dijalankan untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

"Penyusunan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi cukup baik," kata Suahasil saat memberikan kata penutup rapat kerja pembahasan tingkat I pembahasan RUCU APBN 2027.

Menurut Suahasil, kebijakan fiskal tahun depan akan tetap mengedepankan kehati-hatian, tetapi tidak bersifat pasif. APBN akan digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi investasi.

"Kebijakan fiskal harus tetap *prudent*, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan mem-

buka ruang bagi investasi. Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur," ujarnya.

Kesepakatan terbaru

Dalam kesepakatan terbaru, pendapatan negara ditetapkan Rp 3.435,10 triliun, naik dari usulan awal Rp 3.426,03 triliun. Sementara belanja negara menjadi Rp 4.106,26 triliun dari sebelumnya Rp 4.097,19 triliun.

Kenaikan pendapatan terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang ditetapkan Rp 2.911,95 triliun, naik dari Rp 2.907,95 triliun. Di dalamnya, penerimaan pajak ditargetkan Rp 2.593,35 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 318,60 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat menjadi Rp 522,48 triliun dari usulan awal Rp 517,41 triliun. Adapun penerimaan hibah tetap Rp 666,3 miliar.

Di sisi belanja, alokasi belanja pemerintah pusat meningkat menjadi Rp 3.371,26 triliun dari usulan awal Rp 3.362,19 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari belanja kementerian/lembaga yang bertambah dari Rp 1.504,74 triliun menjadi Rp 1.556,89 triliun.

Sekelompok, belanja non kementerian/lembaga turun dari Rp 1.857,45 triliun menjadi Rp 1.814,36 triliun. Adapun transfer ke daerah tetap dipertahankan Rp 735 triliun.

Meskipun terjadi perubahan pada sisi pendapatan dan belanja, pemerintah dan Banggar DPR mempertahankan target defisit Rp 671,6 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Target keseimbangan primer juga tetap mencatat defisit Rp 20,85 triliun.

"Defisit 2,4 persen terhadap PDB akan kami jaga sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, melindungi, dan tetap kita upayakan untuk ke-

dibel," kata Suahasil.

Dibungkus secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, menilai kebijakan target belanja negara sebesar Rp 9,1 triliun dalam poster APBN 2027 yang telah ditetapkan sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor penggerak ekonomi di daerah.

Untuk menjadi stabilisator perekonomian, porsi belanja yang berdampak pada upaya membangkitkan ekonomi harus lebih dominan. "Saat ini yang diperlukan adalah belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui insentif industri manufaktur, penguatan dan insentif UMKM, serta konektivitas infrastruktur," ujarnya.

Subsidi energi dipangkas

Di tengah perubahan poster tersebut, pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati pengurangan anggaran subsidi energi. Alokasinya ditetapkan Rp 261,50 triliun, turun Rp

11,44 triliun dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272,95 triliun.

Meski dipangkas dari usulan awal, anggaran subsidi energi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* realisasi 2026 sebesar Rp 227,25 triliun.

Ketua Banggar DPR Saifuddin Abdullah mengatakan, pengurangan anggaran terutama terjadi pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kilogram. Adapun subsidi listrik tahun berjalan tetap Rp 117,84 triliun dan subsidi listrik kurang bayar 2025 tetap Rp 12,26 triliun.

"Alokasi subsidi energi Rp 261,502,2 miliar lebih rendah Rp 11,443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272,945,3 miliar," kata Saif dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, kemarin.

Subsidi BBM tertentu ditetapkan Rp 28,34 triliun, turun dari usulan Rp 28,69 triliun. Sementara subsidi elpiji tabung 3 kilogram menjadi Rp 103,05

triliun dari sebelumnya Rp 114,14 triliun.

Menurut Saif, penyesuaian tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan. Volume BBM tertentu ditetapkan 19,561 juta kiloliter dan elpiji tabung 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton. Adapun subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp 1.000 per liter.

Terkait subsidi energi, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong pengendalian dan transisi subsidi dilakukan secara bertahap dan inklusif.

Ia menilai, transformasi subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis penerima manfaat perlu didukung integrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pendataan nomor induk kependudukan (NIK) konsumen. "Tetap memastikan kelompok miskin, rentan, UMKM, petani, dan nelayan kecil memperoleh akses energi bersubsidi," ujarnya. (118)